

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH****Attar Dian Suprapti**

Universitas Stikubank Semarang

Email: attar.dhianz@gmail.com

Abstrak

Kualitas laporan keuangan yang rendah dapat mendorong ketidakpercayaan publik atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seyogyanya pemerintah daerah merupakan wakil masyarakat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah anggota staf di Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah. Mengingat tidak banyaknya jumlah staf yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah maka semua staf akan menjadi sampel penelitian. Analisis data mencakup screening dan transformasi informasi yang dikumpulkan untuk mencapai hasil. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikan $p = 0,113$ yang menggambarkan tidak adanya hasil empiris yang mendukung penerimaan Hipotesis 1. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan TI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan Publik, Kualitas Pelaporan Keuangan Publik, Dinas Penanaman Modal

Abstract

The low quality of financial reports can lead to public distrust in the financial management conducted by local governments. Local governments should ideally represent the community in governing, making accountable and transparent financial management a mandatory practice. The aim of this research is to examine the factors influencing public financial management. This research is quantitative in nature. The research design employed is quantitative. The population of this study comprises staff

How to cite:

Attar Dian Suprapti (2023), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, (5) 8, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416>

E-ISSN:[2684-883X](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416)**Published by:**[Ridwan Institute](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416)

members of the Investment and Integrated One-Stop Service Agencies (DPMPTSP) of Central Java Province. Due to the limited number of staff in the DPMPTSP of Central Java Province, all staff members will be included as research samples. Data analysis involves screening and transforming the collected information to achieve results. The research results yielded a significant value of $p = 0.113$, indicating the absence of empirical support for Hypothesis 1. This suggests that the use of IT does not have a significant influence on the quality of government financial reports.

Keywords: *Public Financial Accountability, Public Financial Reporting Quality, Investment and Integrated One-Stop Service Agency*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir telah menerapkan beberapa reformasi pada sistem manajemen keuangan publik dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan juga memastikan bahwa pembelanjaan selaras dengan penciptaan nilai. Banyak negara dengan OECD dan negara-negara Uni Eropa termasuk Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Australia, Denmark, Selandia Baru dan banyak lainnya telah mengadopsi reformasi manajemen keuangan sektor publik manajemen dalam 30 tahun terakhir. Selain itu, banyak pula negara berkembang seperti Korea Selatan, UEA, Turki, dan Chili juga mengikuti langkah serupa dalam mereformasi sistem manajemen keuangan publik (Bunse & Fritz, 2012).

Kualitas laporan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Fokus dari kualitas pelaporan keuangan publik bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh transparansi informasi keuangan, belanja modal, kesehatan keuangan dan ukuran pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Agustinus, 2016).

Kualitas laporan keuangan yang rendah dapat mendorong ketidakpercayaan publik atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seyogyanya pemerintah daerah merupakan wakil masyarakat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat diakibatkan kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang kurang baik dapat menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Padahal kualitas laporan keuangan yang baik diharapkan oleh masyarakat untuk dapat menilai kinerja atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan kinerja keuangan yang baik dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dapat menyelaraskan kepentingan masyarakat. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang kurang baik mengakibatkan informasi yang disajikan tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan erat kaitannya dengan penyajian yang

dilakukan oleh penyusun laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan tidak dapat ditelusuri bukti transaksinya dapat berakibat rendahnya kualitas laporan keuangan. Selain itu, terdapat kebijakan-kebijakan akrual dari pimpinan instansi yang tidak terdapat bukti akrualnya seperti penyusutan aset, cadangan kerugian piutang, perubahan metode pencatatan persediaan yang juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik menunjukkan pimpinan organisasi memiliki itikad baik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Sebaliknya, kualitas laporan keuangan yang rendah dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Ulasan atas kualitas laporan keuangan khususnya pada level pemerintah daerah masih menjadi isu yang menarik untuk diulas, sehingga penelitian atas pengujian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu diinvestigasi lebih lanjut. Kasus pelanggaran dan kecurangan keuangan juga ada pada institusi di bawah Pemerintah Daerah.

Guna meminimalkan pelanggaran dan kecurangan dalam keuangan publik, Pemerintah telah mereformasi kebijakan keuangan publik. Reformasi Manajemen Keuangan Publik muncul dari tantangan pengalaman sebelumnya yang menyebabkan penyalahgunaan sumber daya publik, ketidaksetaraan dalam redistribusi sumber daya dan kurangnya *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Tujuan reformasi dalam Manajemen Keuangan Publik adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Tujuan lainnya adalah untuk menanamkan transparansi dan akuntabilitas karena itu mempromosikan kualitas pemberian layanan.

Manajemen keuangan publik berakar dan manajemen keuangan negara yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian muncul untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi modern. Dengan munculnya Undang-Undang ini diharapkan dapat menciptakan manajemen keuangan negara yang baik, sehingga akan terwujud efektivitas dan efisiensi keuangan negara sebagai langkah dalam menciptakan organisasi publik yang baik (*good governance*), serta menciptakan manajemen keuangan negara sebagai kunci kesuksesan dari keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan organisasi publik. Subyek dari manajemen keuangan publik mencakup: a) Badan/lembaga pemerintah (pusat, daerah dan unit kerja pemerintah), b) Perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD) dan c) Yayasan, organisasi masa, organisasi politik, LSM, dan organisasi nirlaba lainnya.

Undang-undang telah menyediakan berbagai prosedur, kebijakan dan praktik yang harus diikuti oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan publik dana. Undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan publik mengharapkan akan dapat diperolehnya pengelolaan publik yang efektif sumber daya untuk meningkatkan penyampaian layanan kepada publik di tingkat daerah maupun nasional. Sistem manajemen keuangan publik yang efektif membantu memperkuat

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

efisiensi, akuntabilitas dan transparansi sistem Pemerintah dengan memastikan pemanfaatan sumber daya publik secara optimal melalui efisiensi alokatif, disiplin fiskal, ekuitas, nilai uang dan distribusi kekayaan (Fritz et. al., 2017).

Kemampuan pemerintah daerah beserta instansi di bawahnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat akan bergantung pada seberapa baik mereka akan mengelola sumber daya di tangan mereka. Pengalaman di tempat lain menunjukkan bahwa untuk mensejahterakan masyarakat harus memanfaatkan empat aset utama yaitu: inovasi, infrastruktur, sumber daya manusia serta teknologi informasi dan komunikasi (Bulle & Ombui, 2016). Sejumlah penelitian telah dilakukan secara lokal dan internasional pada bidang studi Manajemen Keuangan Publik salah satunya adalah akuntabilitas. Studi sebelumnya yang dilakukan (Ziniyel et al., 2018) dilakukan di negara lain yang memiliki pijakan keuangan dan kerangka hukumnya berbeda dari Indonesia dan temuan tidak dapat digeneralisasikan ke institusi di Indonesia sehingga menyajikan celah kontekstual. Penelitian ini akan meneliti salah satu aspek manajemen keuangan publik yaitu akuntabilitas untuk dapat dijelaskan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, regulasi pemerintah, kompetensi staf, dan adanya pengawasan internal.

Upaya untuk membentuk akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah, menjadikan pemerintah daerah harus memberikan tanggung jawab mereka dalam bentuk publikasi laporan keuangan kepada stakeholder. Bentuk pelaporan keuangan pemerintah daerah pada prinsipnya adalah bentuk asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah (Chodijah & Hidayah, 2018). Penggunaan teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang umum yang bisa dipakai untuk mengelolah data termasuk pada data keuangan publik yaitu dengan memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan ataupun manipulasi data dengan bermacam-macam cara supaya nantinya menghasilkan informasi yang akurat, baik kualitasnya dimana dengan kata lain informasi yang digunakan itu relevan, akurat dan tepat waktu untuk dipergunakan baik privasi, usaha atau bisnis ataupun pada bidang pemerintahan dan juga untuk informasi yang strategi untuk dilakukan pengambilan keputusan. Untuk ini pemerintah daerah bisa mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (A. U. Putri & Djuita, 2021). Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Regulasi pemerintah dalam pengelolaan manajemen keuangan juga banyak dikaitkan dengan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 yang mengamanatkan pemerintah paling lambat sudah menerapkan akuntansi Akruial (*accrualbased accounting*) pada tahun 2008. Penerapan SAP Berbasis Akruial dapat dilaksanakan secara bertahap dari sebelumnya menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju penerapan SAP Berbasis Akruial. Basis kas menuju akruial adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas,

sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual. Pada tanggal 22 Oktober 2010 pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan standar akuntansi pemerintahan yang mengadopsi standar Akuntansi pemerintahan internasional. Penerapan basis akrual pada akuntansi bertujuan untuk memperbaiki keterbatasan dan ketidakcukupan informasi yang disediakan oleh basis kas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Basis Akrual menyediakan informasi yang lebih handal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu organisasi mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya (Maryati et al., 2015).

Kompetensi staf yaitu sebagai suatu kemampuan sumber daya manusia guna untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai sehingga mampu untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut (Wijayanti & Handayani, 2017) dalam hal ini kompetensi memiliki beberapa indikator untuk mengukur tingkat kompetensi sumber daya manusia diantaranya yaitu: Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan (*skill*), Sikap (*attitude*). Sumber daya manusia yang dimaksud dari penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang ada di organisasi pemerintah kabupaten ketapang dimana perannya sangat vital bagi terciptanya manajemen laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian keurangan (*fraud*). Implementasi sistem pengendalian internal menuntut adanya komitmen dan peran aktif para pemimpin daerah pada setiap level dan tingkatan organisasi (Rahmany & Fatimah, 2020).

Banyak penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda mengenai pengaruh penggunaan teknologi informasi, regulasi pemerintah, kompetensi staf dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap manajemen keuangan publik sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Research gap

	Signifikan	Tidak signifikan
Penggunaan teknologi informasi	(Firdaus, 2018) (Chodijah & Hidayah, 2018)	(Rahmawati & Trisnawati, 2021)
Regulasi	(Wijayanti & Handayani, 2017)	(Kesuma et al., 2017)
Kompetensi Staf	(E. S. Putri & Syarief, 2021)	(Wijayanti & Handayani, 2017) (Kesuma et al., 2017)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Pengendalian internal	Widari dan Sutrisno (2017) (Kesuma et al., 2017)	
Good Governance	(Adriana et al.,2022) Indriana & Nasrun, 2019)	(Hasthoro & Sunardi, 2016) (Budiati et al.,2020)

Adanya research gap yang terjadi dari penelitian sebelumnya menjadikan ketertarikan untuk penelitian ini. Selain itu keberadaan perbedaan pengaruh yang diperoleh juga menggambarkan bawa pengaruh dari Penggunaan teknologi informasi, Regulasi dan Kompetensi Staf bersifat kondisional yaitu akan berbeda untuk setiap keberadaan kondisi yang berbeda pada instansi atau organisasi. Dalam konteks organisasi khususnya instansi pelayanan publik maka akan dipertimbangkan untuk menggunakan variabel *good governance* sebagai variabel kondisional yang dimaksud.

Good governance atau tata kelola yang baik merupakan hal mendasar di sektor publik. Unsur tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap tata kelola prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam pelayanan publik: ketiadaan kejujuran finansial dapat menghancurkan sistem ekonomi dan administrasi suatu negara sistem. Tata kelola yang buruk terwujud dengan sendirinya ketika sistem dan struktur yang relevan tidak berfungsi, atau tidak ada. Begitu pula, tata kelola yang baik ditemukan di mana sistem dan struktur dapat berfungsi sebagaimana dimaksud. Efektivitas dan efisiensi dalam implemenasinya merupakan bagian dari prinsip tata kelola, struktur dan proses harus menghasilkan hasil yang memenuhi berbagai kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin. Efektivitas mengacu sejauh mana struktur dan kebijakan memenuhi tujuan tujuan, sedangkan efisiensi mengacu pada meminimalkan sumber daya yang digunakan tanpa mengurangi kualitas. Kebijakan dan prosedur bisa efektif hanya jika mereka mampu mencapai tujuan yang dimaksudkan (Kristensen et al., 2019).

Penggunaan variabel *good governance* dalam penelitian ini diharapkan akan memperluas mengenai faktor pendukung dan penguat yang semakin memperjelas penerapan manajemen keuangan publik. Penggunaan variabel *good governance* sebagai variabel moderating sepanjang pengetahuan penulis belum banyak digunakan dalam konteks penelitian ini sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Selanjutnya penelitian akan dilakukan pada instansi di bawah Pemerintah Daerah. Salah satu instansi yang menjadi perhatian penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPMPTSP. DPMPTSP bukan instansi baru namun instansi yang sudah lama ada dan hanya berganti nama, dimana nama DPMPTSP muncul pada tahun 2016 dari sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesan bahwa pengurusan dan pelayanan penanaman modal dapat dilakukan dengan cepat melalui satu pintu. Konsep satu pintu ini tentunya membutuhkan manajemen yang serius karena tentunya membutuhkan SDM yang kompeten dan penggunaan teknologi informasi yang

baik untuk melakukan proses layanan dengan cepat dan akurat dengan tanpa fraud. selain itu institusi juga memerlukan konsistensi penerapan *good governance* serta sistem pengawasan internal yang baik serta regulasi yang konsisten untuk menjamin bahwa kinerja pelayanan hingga manajemen keuangan insitusi dapat terjadi dan dilaporkan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Pada data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang berupa pertanyaan atau pernyataan secara terstruktur yang dilakukan oleh responden. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Data yang diperoleh dari skala likert yaitu berupa data interval.

Desain penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah anggota staf di Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah. Mengingat tidak banyaknya jumlah staf yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah maka semua staf akan menjadi sampel penelitian.

Kuesioner mempermudah proses pengumpulan data karena banyak pesertanya dicapai dalam proses pengumpulan data. Dalam penyebaran kuisisioner, tujuan penelitian dijelaskan kepada responden. Kuesioner diberikan menggunakan teknik drop dan kemudian mengumpulkan. Kontrol diberlakukan untuk menjamin bahwa semua instrumen yang diberikan kepada peserta diperoleh dengan menyimpan daftar alat yang menunjukkan apa telah didistribusikan dan dikembalikan.

Analisis data mencakup screening dan transformasi informasi yang dikumpulkan untuk mencapai hasil. Data dikumpulkan menggunakan informasi kuesioner diberi kode, diperiksa kelengkapan dan ketepatannya, kemudian dianalisis menggunakan metode kuantitatif untuk memperoleh statistik deskriptif. Untuk memproses informasi, penelitian ini menggunakan SPSS. Perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan deskriptif dan statistik inferensial untuk menghasilkan generalisasi dan temuan demografis. Analisis data kuantitatif akan memungkinkan penelitian untuk membuat kesimpulan dengan mendefinisikan fitur aliran informasi tertentu secara objektif dan sistematis (Ghozali, 2016).

Untuk membangun hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas, model regresi berganda digunakan. Dalam laporan ini, manajemen keuangan publik menjadi dependen sedangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, regulasi pemerintah, kompetensi staf dan pengawasan internal adalah variabel-variabel bebasnya.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + X_5 + b_1X_1 * X_5 + b_2X_2 * X_5 + e$$

Dimana

Y = Akuntabilitas Laporan Keuangan

X1 = Penggunaan Teknologi

X2 = Regulasi

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

- X3 = Kompetensi staf
X4 = Pengawasan Internal
X5 = Good governance
a = Konstanta
b = Koefisien Beta
e = error

Untuk menetapkan signifikansi model penelitian dalam membangun pengaruh TIK, Regulasi, kompetensi staf dan pengawasan internal terhadap manajemen keuangan publik digunakan Analisis Varians (ANOVA), nilai signifikansi F dan T-test digunakan. Data dianalisis pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menentukan seberapa signifikan secara statistik persamaan regresi digunakan statistik F dan statistik t digunakan untuk menetapkan signifikansi statistik dari masing-masing koefisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil sampel pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 70 berkas kuesioner didistribusikan. Namun, setelah proses pengumpulan data, penelitian mengumpulkan 53 kuesioner yang sudah diisi penuh. Ini menunjukkan bahwa tingkat respon untuk penelitian ini adalah 75,71%. Tabel 4.1 di bawah ini adalah ringkasan dari tingkat respons:

Tabel 2 Perincian sampel penelitian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang didistribusikan	70
Kuesioner yang tidak kembali	(17)
Kuesioner tidak terisi lengkap	(0)
Kuesioner yang layak digunakan	53
<i>Respon rate</i>	75,71%

Sumber : Penyebaran dan pengembalian kuesioner

Sebanyak 53 kuesioner atau dengan respon rate sebanyak 75,71% dari total kuesioner dapat kembali dan dengan jawaban yang lengkap. Dengan demikian sebanyak 53 kuesioner tersebut dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian.

Informasi data responden yang dibutuhkan termasuk jenis kelamin, usia, pendidikan dan pengalaman mereka di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	29	54,72
Perempuan	24	45,28
Jumlah	53	100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa bagian terbesar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 54,72%. Adanya distribusi gender yang wajar artinya penelitian ini dapat memperoleh pendapat yang wajar dari kedua gender mengenai pengelolaan laporan keuangan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4 Umur Responden

Umur	Jumlah	Persentase
Di bawah 30 th	11	20,75
31 – 40 th	23	43,40
41 – 50 th	12	22,64
Di atas 51 th	7	13,21
Jumlah	53	100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa bagian terbesar responden berumur 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 23 atau 43,40% dan diikuti dengan kelompok umur 41 – 50 tahun sebanyak 12 orang atau 22,64%. Hasil ini menunjukkan distribusi usia yang wajar dari pegawai instansi pemerintah.

Tabel 5 Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	2	3,77
Diploma	15	28,30
S ₁	31	58,49
S ₂	5	9,43
Jumlah	53	100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian tingkatan pegawai di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah paling banyak adalah berpendidikan sarjana S₁ yaitu sebanyak 31 orang atau 58,49%. Berdasarkan hasil, responden memiliki kualifikasi yang cukup untuk dapat memberikan informasi yang berguna tentang pengelolaan keuangan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 6 Lama kerja Responden

Lama Kerja	Jumlah	Persentase
1 – 5 tahun	12	22,64
6 – 10 tahun	16	30,19
Lebih dari 10 tahun	25	47,17
Jumlah	53	100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian tingkatan si pegawai kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah paling banyak adalah yang memiliki lama kerja selama lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 47,17%. Ini berarti bahwa responden dalam penelitian ini memiliki pengalaman yang cukup lama.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Suatu indikator pertanyaan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil dari uji validitas dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 Hasil uji validitas

No	Variabel / Indikator	Korelasi	r table	Keterangan
1	Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi			
	X1.1	0.757	0,271	Valid
	X1.2	0.722	0,271	Valid
	X1.3	0.792	0,271	Valid
	X1.4	0.768	0,271	Valid
2	Regulasi			
	X2.1	0.847	0,271	Valid
	X2.2	0.741	0,271	Valid
	X2.3	0.696	0,271	Valid
	X2.4	0.742	0,271	Valid
3	Kompetensi Staf			
	X3.1	0.832	0,271	Valid
	X3.2	0.759	0,271	Valid
	X3.3	0.834	0,271	Valid
	X3.4	0.794	0,271	Valid
4	Pengawasan Internal			
	X4.1	0.766	0,271	Valid
	X4.2	0.691	0,271	Valid
	X4.3	0.665	0,271	Valid
	X4.4	0.819	0,271	Valid
5	Kualitas Laporan Keuangan			
	Y1	0.704	0,271	Valid
	Y2	0.714	0,271	Valid
	Y3	0.829	0,271	Valid
	Y4	0.592	0,271	Valid
	Y5	0.740	0,271	Valid
	Y6	0.542	0,271	Valid
6	<i>Good Governance</i>			
	X4.1	0.728	0,271	Valid
	X4.2	0.638	0,271	Valid
	X4.3	0.556	0,271	Valid
	X4.4	0.766	0,271	Valid
	X4.5	0.673	0,271	Valid
	X4.6	0.583	0,271	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel 7 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari r_{table} untuk $n = 53$ yaitu 0,271.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkas pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,754	Reliabel
Regulasi	0,750	Reliabel
Kompetensi Staf	0,814	Reliabel
Pengawasan Internal	0,703	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,781	Reliabel
<i>Good Governance</i>	0,735	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,70 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.

Deskripsi Variabel Penelitian

Semua variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner dengan 5 skala, Selanjutnya setiap pengukuran akan dijumlah untuk masing-masing variabel. Dengan demikian skor masing-masing variabel akan tergantung pada jumlah item kuesiober pengukurnya. Hasil statistik deskriptif akan disajikan dalam tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi Informasi	53	12.00	20.00	16.83	2.03
Regulasi	53	13.00	20.00	16.68	2.07
Kompetensi Staff	53	12.00	20.00	16.09	2.47
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	53	12.00	20.00	16.89	2.12
Kualitas Laporan Keuangan	53	18.00	30.00	24.36	2.77
<i>Good Governance</i>	53	18.00	30.00	24.43	2.75

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi menunjukkan rata-rata empiris sebesar 16,83. Dengan menggunakan 4 item kuesioner, maka skor rata-rata tersebut berada di atas rata-rata teoritis (median teoritis) dari 4 item skala pengukurannya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

yaitu sebesar 12. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum beberapa responden pegawai sudah Teknik Informasi yang baik dalam pekerjaan mereka.

Hasil penelitian mengenai Regulasi menunjukkan rata-rata empiris sebesar 16,68. Dengan menggunakan 4 item kuesioner, maka skor rata-rata tersebut berada di atas rata-rata teoritis (median teoritis) dari 4 item skala pengukurannya yaitu sebesar 12. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum beberapa responden pegawai menilai bahwa mereka sudah memiliki regulasi dalam pelaporan laporan keuangan organisasi.

Hasil penelitian mengenai Kompetensi staff menunjukkan rata-rata empiris sebesar 16,09. Dengan menggunakan 4 item kuesioner, maka skor rata-rata tersebut berada di atas rata-rata teoritis (median teoritis) dari 4 item pengukurannya yaitu sebesar 12. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki kompetensi yang baik.

Hasil penelitian mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menunjukkan rata-rata empiris sebesar 16,89. Dengan menggunakan 4 item kuesioner, maka skor rata-rata tersebut berada di atas rata-rata teoritis (median teoritis) dari 4 item skala pengukurannya yaitu sebesar 12. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pengendalian internal yang baik dalam akuntansi keuangan mereka.

Tabulasi data tersebut menunjukkan bahwa untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan di Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan rata-rata empiris sebesar 24,36. Dengan menggunakan 6 item kuesioner, maka skor rata-rata tersebut berada di atas rata-rata teoritis (median teoritis) dari 6 item skala pengukurannya yaitu sebesar 18. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden pegawai menilai bahwa laporan keuangan mereka penelitian telah memiliki Kualitas yang baik.

Tabulasi data tersebut menunjukkan bahwa untuk variabel *Good Governance* di Instansi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan rata-rata empiris sebesar 24,43. Dengan menggunakan 6 item kuesioner, maka skor rata-rata tersebut berada di atas rata-rata teoritis (median teoritis) dari 6 item skala pengukurannya yaitu sebesar 18. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden pegawai menilai bahwa instansi telah menerapkan *Good Governance* yang baik.

Pengujian Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier, dimana teknik tersebut harus bebas dari masalah penyimpangan terhadap asumsi klasik. Hasil pengujian pengaruh asumsi klasik dapat disajikan pada sebagai berikut.

Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk variabel secara individual dan juga pengujian untuk model regresi. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov Sminov. Hasil pengujian normalitas secara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10 Uji normalitas

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.75624845
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.055
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Hasil uji dengan Kolmogorov Smirnov menunjukkan signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Hasil ini mendukung akan diperolehnya data yang berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. Pengujian multikolinieritas dilakukan pada model regresi. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.750	1.334
Regulasi	.589	1.699
Kompetensi Staff	.957	1.045
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.489	2.045
<i>Good Governance</i>	.538	1.857
X1.X5	.961	1.041
X3.X5	.914	1.094

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF yang berada jauh di bawah angka 10 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan tidak mengandung masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Jika terdapat hasil yang signifikan, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 12 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.123	2.495		3.255	.002
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.159	.084	-.294	-1.890	.065
Regulasi	-.106	.093	-.201	-1.145	.258

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Kompetensi Staff	-.055	.061	-.126	-.911	.367
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	-.070	.099	-.135	-.700	.487
<i>Good Governance</i>	-.010	.073	-.024	-.132	.896
X1.X5	-.102	.141	-.100	-.723	.473
X3.X5	.031	.152	.029	.203	.840

a. Dependent Variable: AbsRes

Hasil pengujian heteroskedastisitas uji Glejser menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak memiliki gejala adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS for Windows* versi 22. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya diringkas sebagai berikut:

Tabel 13 Hasil analisis regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.872	4.434		-1.324	.192
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.241	.149	.176	1.614	.113
Regulasi	.466	.165	.349	2.834	.007
Kompetensi Staff	.227	.108	.203	2.100	.041
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.447	.177	.342	2.526	.015
<i>Good Governance</i>	.290	.130	.288	2.235	.030
X1.X5	.540	.250	.208	2.156	.036
X3.X5	.644	.270	.236	2.381	.022

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi bentuk standard adalah sebagai berikut:

$$Y = -5.872 + 0.241 X_1 + 0.466 X_2 + 0.227 X_3 + 0.447 X_4 + 0.290 X_5 + 0,540 X_1.X_5 + 0,644 X_3.X_5 + e$$

Semua koefisien regresi diperoleh memiliki tanda koefisien positif sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian kemaknaan pengaruh prediktor sebagaimana pada model tersebut selanjutnya dibuktikan dengan pengujian hipotesis.

Uji Keباikan Model (*Goodness of fit Model*)

Untuk menguji keباikan model regresi pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi diperoleh sebagai berikut:

Tabel 14 Hasil pengujian model regresi

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	237.799	7	33.971	9.531	.000 ^b
Residual	160.389	45	3.564		
Total	398.189	52			

a. *Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan*

b. *Predictors: (Constant), X3.X5, Kompetensi Staff, X1.X5, Good Governance , Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi , Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 9,531 dengan signifikansi sebesar 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa kualitas lapaoraan keuangan daat dikelaskan oleh variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, Regulasi, Kompetensi Staff, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Good Governance* dan interaksi Pemanfaatan Teknologi Informasi* *Good Governance* dan Kompetensi Staff* *Good Governance*

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (adjusted R²) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat.

Tabel 15 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.773 ^a	.597	.535	1.88791

a. *Predictors: (Constant), X3.X5, Kompetensi Staff, X1.X5, Good Governance , Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi , Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*

b. *Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuanga*

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,535. Hal ini berarti 53,5% Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh variabel bebas Pemanfaatan Teknologi Informasi, Regulasi, Kompetensi Staff, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Good Governance* dan interaksi Pemanfaatan Teknologi Informasi* *Good Governance* dan Kompetensi Staff* *Good Governance*. Sedangkan sisanya 46,5% Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variable lain.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan nilai statistik t beserta signifikansinya.

Tabel 16 Prngujian Hipotesis

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-1.324	.192
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.614	.113
Regulasi	2.834	.007
Kompetensi Staff	2.100	.041
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	2.526	.015
<i>Good Governance</i>	2.235	.030

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

X1.X5	2.156	.036
X3.X5	2.381	.022

1. Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas laporan keuangan diperoleh nilai $t = 1,614$ dengan signifikansi $0,113$ ($p > 0,05$). Dengan signifikansi yang lebih besar dari $0,05$, maka diperoleh bahwa Hipotesis 1 ditolak. Hal ini berarti bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi yang lebih baik belum memberikan Kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

2. Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian pengaruh Regulasi terhadap Kualitas laporan keuangan hasil pemeriksaan diperoleh nilai $t = 2,834$ dengan signifikansi $0,007$ ($p = 0,05$). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$, maka diperoleh bahwa Hipotesis 2 diterima. Hal ini berarti bahwa Regulasi akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

3. Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian pengaruh Kompetensi Staff terhadap Kualitas laporan keuangan diperoleh nilai $t = 2,100$ dengan signifikansi $0,041$ ($p < 0,05$). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa Hipotesis 3 diterima. Hal ini berarti bahwa Kompetensi Staff yang lebih baik akan memberikan Kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

4. Pengujian Hipotesis 4

Hasil pengujian pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas laporan keuangan diperoleh nilai $t = 2,526$ dengan signifikansi $0,015$ ($p < 0,05$). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa Hipotesis 4 diterima. Hal ini berarti bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang lebih baik akan memberikan Kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

5. Pengujian Hipotesis 5

Hasil pengujian pengaruh interaksi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan *Good Governance* terhadap Kualitas laporan keuangan diperoleh nilai $t = 2,156$ dengan signifikansi $0,036$ ($p < 0,05$). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa Hipotesis 5 diterima. Hal ini berarti bahwa *Good Governance* mampu memoderasi hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas laporan keuangan.

6. Pengujian Hipotesis 6

Hasil pengujian pengaruh interaksi Kompetensi Staff dengan *Good Governance* terhadap Kualitas laporan keuangan diperoleh nilai $t = 2,156$ dengan signifikansi $0,036$ ($p < 0,05$). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa Hipotesis 5 diterima. Hal ini berarti bahwa *Good Governance* mampu memoderasi hubungan Kompetensi Staff dengan Kualitas laporan keuangan.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas laporan keuangan.

Hipotesis pertama memperkirakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan TI terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikan $p = 0,113$ yang menggambarkan tidak adanya hasil empiris yang mendukung penerimaan Hipotesis 1. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan TI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sistem Informasi Keuangan berfungsi penuh untuk mewujudkan perbaikan pengelolaan keuangan di lingkungan instansi pemerintah melalui penyediaan informasi keuangan terkini kepada pemangku kepentingan di bidang akuntansi dan manajemen keuangan sehingga mempromosikan pengelolaan sumber daya publik yang efisien. Pada cara yang sama menunjukkan bahwa TI memfasilitasi otomatisasi proses pengelolaan keuangan daerah sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.

Teknologi informasi dinilai dapat memegang peran penting dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi.

Selain itu, manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan *multiprocessing*. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

Namun hasil ini justru memberikan kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi hanya merupakan satu perangkat namun perangkat tersebut masih memerlukan sumber daya manusia sebagai pengguna teknologi tersebut sehingga ketersediaan teknologi informasi belum sepenuhnya mempengaruhi kualitas laporan keuangan instansi. Hasil ini mendukung penelitian (Rahmawati & Trisnawati, 2021).

2. Pengaruh Regulasi terhadap Kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis dua bahwa regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi sebagai bentuk aturan yang ditetapkan dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang semakin baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen membuat laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan

atas laporan keuangandan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh BPK maka kontrol terhadap kualitas laporan keuangan instansi akan semakin dapat terukur dengan baik.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh hasil penelitian Jauhari et al (2021) yang menemukan bahwa regulasi pemerintah yang berupa Standar Akuntansi Pemerintah maupun sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Kompetensi Staff terhadap Kualitas laporan keuangan.

Hipotesis ketiga memperkirakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kompetensi staf dan kualitas laporan keuangan di lingkungan instansi pemerintah. Hasil penelitian diperoleh tingkat signifikan $p=0,041$ yang menunjukkan bukti terhadap diterimanya hipotesis 3. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi staf memiliki pengaruh yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijayanti dan Handayani (2017) maupun Putri & Syarief (2021). Kondisi demikian menunjukkan bahwa adanya kualitas yang baik dari SDM keuangan mampu memberikan Kualitas laporan keuangan yang baik.

Adanya pengaruh yang signifikan dari kualitas SDM terhadap Kualitas laporan keuangan adalah karena kompetensi dan kondisi SDM di sub bagian akuntansi/administrasi keuangan sudah memadai, dari segi kualifikasinya. Selain itu kompetensi yang dimiliki dimanfaatkan secara baik untuk menjadikan laporan keuangan yang semakin berkualitas.

4. Pengaruh Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas laporan keuangan.

Hipotesis empat memperkirakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari audit internal terhadap kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah. Hasil pengujian menunjukkan tingkat signifikansi, $P=0,015$ yang menggambarkan bukti yang sangat kuat atas pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil di atas mendukung pandangan bahwa audit internal mendorong pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten daerah dengan mengedepankan teknik disiplin dan sistematis untuk evaluasi dan peningkatan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola. Demikian juga, menunjukkan bahwa audit internal akan meningkatkan manajemen keuangan dalam pengelolaan sumber daya publik dengan mengevaluasi kredibilitas catatan, mengidentifikasi anomali dalam catatan dan memastikan bahwa catatan inventaris diselaraskan dengan inventaris fisik dalam organisasi.

Adanya pengaruh yang positif mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah aspek pengendalian internal oleh instansi dapat menjelaskan dan meningkatkan transparansi keuangan Pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah

pengendalian internal dapat mengurangi keterbukataan dan transparansi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Wijayanti dan Handayani (2017) maupun Rahmawati & Trisnawati (2021).

5. Pengaruh Good Governance dalam memoderasi Pemanfaatan TI dengan Kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis kelima (H_5) bahwa *Good Governance* dapat memodifikasi hubungan pemanfaatan TI dengan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *Good Governance*, maka akan semakin meningkatkan hubungan antara pemanfaatan TI dengan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah.

Pada dasarnya *Good Governance* tersebut untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan pemerintah kearah peningkatan kinerja, pentingnya penerapan *Good Governance* tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berupa penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

6. Pengaruh Good Governance dalam memoderasi Kompetensi staff dengan Kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis kelima (H_5) bahwa *Good Governance* dapat memodifikasi hubungan kompetensi staff dengan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *Good Governance*, maka akan semakin meningkatkan hubungan antara kompetensi staff TI dengan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah.

Hubungan antara Kompetensi staff dengan Kualitas laporan keuangan adalah akan memberikan ruang kepada setiap pegawai untuk semakin memahami akuntansi dan peran akuntansi sehingga akan mendorong mereka untuk tidak memberikan nama jelek atas profesi mereka, sehingga hal ini akan mendorong instansi untuk dapat memberikan Kualitas laporan keuangan yang baik. Keberadaan *Good Governance* akan semakin memperkuat hubungan tersebut dengan mengarahkan dan mengelola kegiatan pemerintah kearah peningkatan kualitas pelaporan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang lebih baik belum mampu meningkatkan Kualitas penyajian laporan keuangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan. Regulasi yang lebih ketat akan meningkatkan keterandalan penyajian laporan keuangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kualitas Staff memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan. Kualitas staff yang lebih berkualitas dan kompeten akan meningkatkan keterandalan penyajian laporan keuangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Pengendalian intern Akuntansi yang lebih baik oleh instansi pemerintah akan meningkatkan Kualitas penyajian laporan keuangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Good governance* dapat memoderasi hubungan Pemanfaatan TI dengan Kualitas laporan keuangan. Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap Kualitas penyajian laporan keuangan akan lebih besar pada instansi yang memiliki *Good Governance* yang lebih baik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Good Governance* dapat memoderasi hubungan Kompetensi staff dengan Kualitas laporan keuangan. Pengaruh Kompetensi staff terhadap Kualitas penyajian laporan keuangan akan lebih besar pada instansi yang memiliki *Good Governance* yang lebih baik.

BLIBLIOGRAFI

- Agustinus, J. (2016). Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Kekuatan Ekonomi bagi Masyarakat Papua dan Papua Barat di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 14(4), 727–734. <https://doi.org/10.18202/jam23026332.14.4.13>
- Bulle, S. W., & Ombui, K. A. (2016). Determinants of Leadership and Governance in Marsabit County, Kenya. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 6(11), 174–181.
- Bunse, S., & Fritz, V. (2012). Making Public Sector Reforms Work Political and Economic Contexts, Incentives, and Strategies. *Policy Research Working Paper*, 6174, 1–24.
- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Tekun*, 8(1), 34–48.
- Firdaus, M. I. (2018). Pengaruh Pemanfaatan TI, Kepatuhan Atas Peraturan, Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 330–346.
- Fritz et. al. (2017). Political Economy of Public Financial Management Reforms. *Work Bank Group*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). In *Universitas Diponegoro*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Kesuma, D. P., Anwar, C., & Darmansyah. (2017). Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika*, 1(2), 141–146.

- Kristensen, J. K., Bowen, M., Long, C., Mustapha, S., & Zrinski, U. (2019). PEFA, Public Financial Management, and Good Governance. In *PEFA, Public Financial Management, and Good Governance*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1466-2>
- Maryati, U., Yentifa, A., & Andriani, W. (2015). IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10(2), 1–10.
- Putri, A. U., & Djuita, P. (2021). Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kelurahan Sukajaya Kota Palembang. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 226–232.
- Putri, E. S., & Syarief, A. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)*. 4–5.
- Rahmany, S., & Fatimah. (2020). Analisis sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bengkalis dalam perspektif islam (studi kasus pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bengkalis). *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 110–123.
- Rahmawati, M., & Trisnawati, R. (2021). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Review of Applied Accounting Research*, 1(2), 1–11.
- Wijayanti, R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh kompetensi sdm dan implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017*, 6, 18.
- Ziniyel, D., Otoo, I. C., & Andzie, T. A. (2018). Effect Of Internal Audit Practices On Financial Management. *Korean Journal of Business Ethics*, 18(1), 1–35. <https://doi.org/10.34273/kjbe.2018.18.1.001>

Copyright Holder:

Attar Dian Suprapti (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

